



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI F NOMOR 425**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) Bupati menetapkan pengalokasian ADD untuk setiap Desa dan Pasal 97 ayat (3) Bupati menetapkan pengalokasian Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
 7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Seri F Nomor 346);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017**

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Dana Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran ... /

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penghasilan Tetap Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Biaya bantuan Pelaksanaan Pilkades;
 - g. Biaya bantuan Desa Binaan PKK;
 - h. Penyusunan Profil Desa;
 - i. Cetak Buku Adminitrasi Desa; dan
 - j. Biaya ... /

- j. Biaya kegiatan Pemerintah Desa lainnya.
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Samosir.
- (5) Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 60% yang dibagi secara merata kepada 128 Desa se-Kabupaten Samosir; dan
- b. Alokasi yang dihitung secara proporsional sebesar 40% yang dibagi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa se-Kabupaten Samosir.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa Tahun Anggaran 2017; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I.
- (5) Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang melaporkan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Samosir.

Pasal 7

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua Bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar

Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan dana pembangunan fisik dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Maret 2017

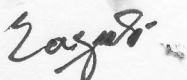
BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 April
Rlt. SEKRETARIS DAERAH,

2017



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI F NOMOR 425

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN**BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	
	012	SIMANINDO							
1	001	TOMOK	292,994,000	20,382,000	313,376,000	8,627,000	5,422,000	327,425,000	
2	002	SIHUSAPI	300,294,000	28,578,000	328,872,000	5,293,000	3,326,000	337,491,000	
3	003	MADUMA	290,294,000	38,446,000	328,740,000	3,690,000	2,318,000	334,748,000	
4	004	DOSROHA	290,294,000	39,321,000	329,615,000	3,856,000	2,423,000	335,894,000	
5	005	AMBARITA	300,294,000	15,161,000	315,455,000	10,716,000	6,734,000	332,905,000	
6	006	MARTOBA	300,294,000	25,655,000	325,949,000	7,862,000	4,941,000	338,752,000	
7	007	GAROGA	290,294,000	22,096,000	312,390,000	5,447,000	3,423,000	321,260,000	
8	008	SIMANINDO SANGKAL	300,294,000	21,188,000	321,482,000	7,328,000	4,605,000	333,415,000	
9	009	CINTA DAME	290,294,000	35,515,000	325,809,000	8,963,000	5,633,000	340,405,000	
10	010	HUTA GINJANG	300,294,000	38,668,000	338,962,000	5,194,000	3,264,000	347,420,000	
11	011	PARDOMUAN	292,994,000	15,058,000	308,052,000	4,551,000	2,860,000	315,463,000	
12	012	PARMONANGAN	290,294,000	15,629,000	305,923,000	7,394,000	4,646,000	317,963,000	
13	013	PARBALOHAN	290,294,000	18,588,000	308,882,000	4,098,000	2,575,000	315,555,000	
14	014	TANJUNGAN	290,294,000	23,888,000	314,182,000	5,323,000	3,345,000	322,850,000	
15	015	SIMARMATA	290,294,000	23,344,000	313,638,000	6,984,000	4,389,000	325,011,000	
16	017	TOMOK PARSAORAN	318,014,000	19,713,000	337,727,000	10,171,000	6,392,000	354,290,000	
17	018	MARLUMBA	309,674,000	23,389,000	333,063,000	8,411,000	5,286,000	346,760,000	
18	019	SIMANINDO	309,674,000	18,297,000	327,971,000	7,974,000	5,011,000	340,956,000	
19	020	UNJUR	309,674,000	16,947,000	326,621,000	10,173,000	6,393,000	343,187,000	
20	021	SIALLAGAN PINDARAYA	309,674,000	17,464,000	327,138,000	3,984,000	2,503,000	333,625,000	
		JUMLAH	5,966,520,000	477,327,000	6,443,847,000	136,039,000	85,489,000	6,665,375,000	
	022	ONAN RUNGGU							
21	001	PAKPAHAN	290,294,000	17,057,000	307,351,000	5,678,000	3,568,000	316,597,000	
22	002	HUTA HOTANG	290,294,000	18,828,000	309,122,000	8,408,000	5,284,000	322,814,000	
23	003	SITINJAK	290,294,000	30,096,000	320,390,000	6,760,000	4,248,000	331,398,000	
24	004	PARDOMUAN	290,294,000	33,586,000	323,880,000	8,438,000	5,303,000	337,621,000	
25	005	TAMBUN SUNGKEAN	290,294,000	17,380,000	307,674,000	4,472,000	2,810,000	314,956,000	
26	006	RINA BOLAK	290,294,000	23,526,000	313,820,000	4,733,000	2,974,000	321,527,000	
27	007	ONAN RUNGGU	290,294,000	22,612,000	312,906,000	3,634,000	2,283,000	318,823,000	
28	008	SITAMIANG	290,294,000	14,807,000	305,101,000	4,183,000	2,628,000	311,912,000	
29	009	JANJI MATOGU	290,294,000	20,320,000	310,614,000	5,066,000	3,183,000	318,863,000	
30	010	SILIMA LOMBU	278,108,000	17,116,000	295,224,000	3,621,000	2,275,000	301,120,000	
31	011	SIPIRA	290,294,000	27,481,000	317,775,000	6,858,000	4,310,000	328,943,000	
32	012	HARIAN	290,294,000	37,395,000	327,689,000	5,551,000	3,488,000	336,728,000	
		JUMLAH	3,471,342,000	280,204,000	3,751,546,000	67,402,000	42,354,000	3,861,302,000	
	032	NAINGGOLAN							
33	001	PANGALAN	292,994,000	26,937,000	319,931,000	7,334,000	4,608,000	331,873,000	
34	002	HUTARIHIT	290,294,000	32,724,000	323,018,000	6,288,000	3,951,000	333,257,000	
35	003	SINAGA URUK PANDIANGAN	290,294,000	35,034,000	325,328,000	6,750,000	4,241,000	336,319,000	
36	004	TOGUAN GALUNG	290,294,000	43,382,000	333,676,000	5,768,000	3,625,000	343,069,000	
37	005	PANANGGANGAN	290,294,000	20,744,000	311,038,000	6,757,000	4,246,000	322,041,000	
38	006	PASARAN PARSAORAN	290,294,000	27,535,000	317,829,000	4,736,000	2,976,000	325,541,000	
39	007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	290,294,000	22,612,000	312,906,000	4,795,000	3,013,000	320,714,000	
40	008	SIBONOR OMPU RATUS	390,294,000	22,126,000	412,420,000	6,570,000	4,128,000	423,118,000	

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL		
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)
41	009	NAINGGOLAN	290,294,000	29,533,000	319,827,000	9,589,000	6,026,000	335,442,000
42	010	PASARAN I	300,294,000	23,359,000	323,653,000	4,406,000	2,769,000	330,828,000
43	013	PANANGGANGAN II	309,674,000	23,952,000	333,626,000	5,433,000	3,414,000	342,473,000
44	014	SIPINGGAN	309,674,000	19,693,000	329,367,000	5,764,000	3,622,000	338,753,000
45	015	JANJI MARAPOT	309,674,000	24,271,000	333,945,000	5,765,000	3,622,000	343,332,000
		JUMLAH	3,944,662,000	351,902,000	4,296,564,000	79,955,000	50,241,000	4,426,760,000
	042	PALIPI						
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	275,408,000	19,344,000	294,752,000	4,195,000	2,636,000	301,583,000
47	002	GORAT PALLOMBUAN	290,294,000	20,849,000	311,143,000	5,385,000	3,383,000	319,911,000
48	003	URAT II	290,294,000	21,230,000	311,524,000	5,454,000	3,427,000	320,405,000
49	004	PALIPI	290,294,000	28,258,000	318,552,000	6,998,000	4,398,000	329,948,000
50	005	PARDOMUAN NAULI	290,294,000	40,423,000	330,717,000	4,291,000	2,696,000	337,704,000
51	006	HATOGUAN	290,294,000	28,380,000	318,674,000	4,826,000	3,033,000	326,533,000
52	007	SIMBOLON PURBA	305,366,000	42,560,000	347,926,000	10,481,000	6,586,000	364,993,000
53	008	SIGAOL SIMBOLON	290,294,000	29,955,000	320,249,000	6,824,000	4,288,000	331,361,000
54	009	URAT TIMUR	290,294,000	20,489,000	310,783,000	4,945,000	3,107,000	318,835,000
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	290,294,000	25,875,000	316,169,000	5,086,000	3,196,000	324,451,000
56	011	PARSAORAN URAT	290,294,000	18,353,000	308,647,000	3,698,000	2,323,000	314,668,000
57	012	HUTAGINJANG	275,408,000	24,784,000	300,192,000	4,721,000	2,966,000	307,879,000
58	014	SIGAOL MARBUN	290,294,000	42,887,000	333,181,000	4,783,000	3,005,000	340,969,000
59	018	HUTADAME	294,788,000	20,288,000	315,076,000	5,223,000	3,282,000	323,581,000
60	019	PALLOMBUAN	309,674,000	15,171,000	324,845,000	4,183,000	2,628,000	331,656,000
61	020	PAMUTARAN	294,788,000	24,214,000	319,002,000	4,453,000	2,798,000	326,253,000
62	021	SIDEAK	309,674,000	20,396,000	330,070,000	5,316,000	3,340,000	338,726,000
		JUMLAH	4,968,046,000	443,456,000	5,411,502,000	90,862,000	57,092,000	5,559,456,000
	052	HARIAN						
63	001	SOSOR DOLOK	275,408,000	23,721,000	299,129,000	4,430,000	2,783,000	306,342,000
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	292,994,000	58,719,000	351,713,000	8,073,000	5,073,000	364,859,000
65	003	HARIARA POHAN	306,974,000	27,733,000	334,707,000	4,429,000	2,783,000	341,919,000
66	004	DOLOK RAJA	390,294,000	21,414,000	411,708,000	4,257,000	2,675,000	418,640,000
67	006	SAMPUR TOBA	290,294,000	27,789,000	318,083,000	5,445,000	3,422,000	326,950,000
68	007	SIPARMAHAN	306,974,000	27,144,000	334,118,000	5,033,000	3,162,000	342,313,000
69	008	TURPUK LIMBONG	292,994,000	15,325,000	308,319,000	4,687,000	2,945,000	315,951,000
70	009	TURPUK SAGALA	275,408,000	19,375,000	294,783,000	4,493,000	2,823,000	302,099,000
71	010	TURPUK MALAU	275,408,000	17,928,000	293,336,000	4,524,000	2,843,000	300,703,000
72	011	TURPUK SIHOTANG	275,408,000	19,433,000	294,841,000	5,224,000	3,282,000	303,347,000
73	012	JANJI MARTAHAN	292,088,000	22,301,000	314,389,000	4,033,000	2,534,000	320,956,000
74	014	HUTAGALUNG	319,674,000	52,643,000	372,318,179	6,207,000	3,900,000	382,425,179
75	015	HARIARAPINTU	309,674,000	60,105,000	369,779,000	5,330,000	3,349,000	378,458,000
		JUMLAH	3,903,592,000	393,630,000	4,297,223,179	66,165,000	41,574,000	4,404,962,179
	062	SIANJAR MULA MULA						
76	001	HUTA GINJANG	290,294,000	30,238,000	320,532,000	4,905,000	3,082,000	328,519,000
77	002	SINGKAM	290,294,000	24,504,000	314,798,000	5,585,000	3,510,000	323,893,000
78	003	HASINGGAAN	290,294,000	38,930,000	329,224,000	4,809,000	3,022,000	337,055,000
79	004	AEK SIPITUDAI	292,994,000	19,612,000	312,606,000	5,681,000	3,570,000	321,857,000
80	005	HUTA GURGUR	290,294,000	32,753,000	323,047,000	4,735,000	2,975,000	330,757,000
81	006	SIANJUR MULA MULA	290,294,000	23,491,000	313,785,000	3,621,000	2,275,000	319,681,000
82	007	BOHO	290,294,000	28,246,000	318,540,000	4,482,000	2,816,000	325,838,000
83	008	SIBORO	290,294,000	28,392,000	318,686,000	5,543,000	3,483,000	327,712,000
84	009	SIMARIHIT	290,294,000	24,477,000	314,771,000	4,483,000	2,817,000	322,071,000
85	010	GINOLAT	290,294,000	18,145,000	308,439,000	5,320,000	3,343,000	317,102,000
86	011	BONAN DOLOK	290,294,000	31,895,000	322,189,000	5,565,000	3,497,000	331,251,000
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	409,674,000	19,394,000	429,068,000	4,406,000	2,769,000	436,243,000
		JUMLAH	3,605,608,000	320,077,000	3,925,685,000	59,135,000	37,159,000	4,021,979,000
	072	RONGGUR NIHUTA						
88	001	SALAON TOBA	290,294,000	20,753,000	311,047,000	5,478,000	3,442,000	319,967,000
89	002	LINTONG NIHUTA	292,994,000	32,585,000	325,579,000	4,015,000	2,523,000	332,117,000
90	003	SALAON TONGA TONGA	290,294,000	20,810,000	311,104,000	3,629,000	2,280,000	317,013,000
91	004	SALAON DOLOK	290,294,000	29,151,000	319,445,000	5,911,000	3,714,000	329,070,000
92	005	RONGGUR NIHUTA	290,294,000	41,556,000	331,850,000	8,405,000	5,282,000	345,537,000
93	006	SABUNGAN NIHUTA	290,294,000	23,137,000	313,431,000	5,469,000	3,437,000	322,337,000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA				TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL		
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)
			292,994,000	31,909,000	324,903,000	4,653,000	2,924,000	332,480,000
94	007	PARADUAN	302,994,000	35,513,000	338,507,000	6,503,000	4,087,000	349,097,000
95	008	SIJAMBUR				44,063,000	27,689,000	2,647,618,000
		JUMLAH	2,340,452,000	235,414,000	2,575,866,000			
	082	PANGURURAN						312,501,000
96	001	LUMBAN SS DOLOK	275,408,000	27,896,000	303,304,000	5,648,000	3,549,000	337,572,000
97	002	LUMBAN SS TORUA	290,294,000	38,125,000	328,419,000	5,621,000	3,532,000	337,465,000
98	003	PARBABA DOLOK	290,294,000	30,820,000	321,114,000	10,041,000	6,310,000	330,858,000
99	004	HUTA TINGGI	292,994,000	28,053,000	321,047,000	6,025,000	3,786,000	328,688,000
100	005	PARHORASAN	290,294,000	27,726,000	318,020,000	6,551,000	4,117,000	310,642,000
101	006	PARDOMUAN NAULI	275,408,000	22,459,000	297,867,000	7,845,000	4,930,000	314,635,000
102	007	PARSAORAN I	290,294,000	17,262,000	307,556,000	4,347,000	2,732,000	367,571,000
103	008	RIANIATE	305,366,000	50,840,000	356,206,000	6,979,000	4,386,000	302,897,000
104	009	HUTA BOLON	275,408,000	18,782,000	294,190,000	5,347,000	3,360,000	304,695,000
105	010	PANAMPANGAN	275,408,000	18,079,000	293,487,000	6,883,000	4,325,000	305,564,000
106	011	PARDUGUL	275,408,000	15,961,000	291,369,000	8,717,000	5,478,000	347,131,000
107	012	HUTA NAMORA	290,294,000	44,487,000	334,781,000	7,584,000	4,766,000	313,703,000
108	013	PARLONDUT	275,408,000	23,458,000	298,866,000	9,111,000	5,726,000	340,017,000
109	014	TANJUNG BUNGA	290,294,000	39,743,000	330,037,000	6,129,000	3,851,000	327,813,000
110	015	PARMONANGAN	290,294,000	24,524,000	314,818,000	7,980,000	5,015,000	406,726,000
111	016	SAIT NIHUTA	375,408,000	20,019,000	395,427,000	6,939,000	4,360,000	302,504,000
112	017	SITUNGKIR	278,108,000	16,522,000	294,630,000	4,836,000	3,038,000	315,616,000
113	018	SIANTING-ANTING	278,108,000	21,411,000	299,519,000	9,885,000	6,212,000	302,987,000
114	019	SIALANGUAN	275,408,000	17,325,000	292,733,000	6,297,000	3,957,000	402,038,000
115	020	LUMBAN PINGGOL	375,408,000	18,465,000	393,873,000	5,014,000	3,151,000	377,007,000
116	021	PARDOMUAN I	305,366,000	34,471,000	339,837,000	22,828,000	14,342,000	305,970,000
117	022	SITOLU HUTA	275,408,000	19,605,000	295,013,000	6,729,000	4,228,000	306,216,000
118	023	SINABULAN	278,108,000	19,368,000	297,476,000	5,367,000	3,373,000	305,339,000
119	024	AEK NAULI	275,408,000	21,408,000	296,816,000	5,234,000	3,289,000	316,837,000
120	025	SIOPAT SOSOR	290,294,000	13,273,000	303,567,000	8,149,000	5,121,000	8,222,992,000
		JUMLAH	7,289,890,000	630,082,000	7,919,972,000	186,086,000	116,934,000	
	092	SITIO-TIO						333,102,000
121	001	HOLBUNG	290,294,000	34,676,000	324,970,000	4,994,000	3,138,000	430,696,000
122	002	JANJI RAJA	390,294,000	31,593,000	421,887,000	5,410,000	3,399,000	327,928,000
123	003	SABULAN	290,294,000	29,125,000	319,419,000	5,226,000	3,283,000	326,501,000
124	004	BUNTU MAULI	290,294,000	27,973,000	318,267,000	5,057,000	3,177,000	364,659,000
125	005	TAMBA DOLOK	316,974,000	37,597,000	354,571,000	6,195,000	3,893,000	342,624,000
126	006	CINTA MAJU	300,294,000	31,851,000	332,145,000	6,435,000	4,044,000	346,340,000
127	007	PARSAORAN	309,674,000	29,295,000	338,969,000	4,527,000	2,844,000	350,569,000
128	008	JANJI MARIA	309,674,000	32,841,000	342,515,000	4,949,000	3,105,000	2,822,419,000
		JUMLAH	2,497,792,000	254,951,000	2,752,743,000	42,793,000	26,883,000	
	TOTAL		37,987,904,000	3,387,043,000	41,374,948,179	772,500,000	485,415,000	42,632,863,179

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

[Signature]
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI F NOMOR 425